



Buletin

Parlementaria

Nomor 993/II/2018 • Februari 2018

BURT Minta Adanya Rekam Medis Untuk ANGGOTA DPR



TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN





Tim Kunspek BURT DPR meninjau layanan Jamkestama di RS Pertamina Kaltim

BURT Minta Adanya Rekam Medis Untuk Anggota DPR

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi para pesertanya di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (30/1). BURT DPR meminta perlu adanya rekam medis para pejabat negara, khususnya Anggota DPR.

Dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, delegasi BURT berkesempatan meninjau sarana dan prasarana yang dimiliki RS Pertamina Balikpapan. Menurut Novita, fasilitas khususnya peralatan RS ini cukup baik, seperti sudah adanya alat untuk cek jantung.

“Diawal tahun, kita harapkan semuanya sudah terekam, sehingga dengan satu kartu itu bisa di rumah sakit provider manapun bisa melihat bahwa ada historis penyakit, kemudian juga obat apa saja yang sudah pernah dikonsumsi. Sehingga pada saat ada yang mengalami sakit, dokternya tidak perlu susah payah, tinggal melihat dari sejarahnya, jadi bisa tertangani dengan lebih tepat,” kata Novita.

Kemudian, tambah politisi F-Gerindra itu, kedepan diperlukan adanya koordinasi baik DPR atau pejabat negara dengan Jasindo dan rumah sakit yang ditunjuk menjadi provider dari Jasindo.

“Ini diperlukan adanya informasi dua arah. Jadi tidak hanya kita ingin apa, tetapi disitu terjalin komunikasi dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai, tidak hanya untuk kita sendiri tetapi juga untuk masyarakat umumnya,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah ini.

Dalam kesempatan itu, Direktur RS Pertamina Balikpapan Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya sangat memahami kebutuhan yang dialami oleh Anggota DPR dalam memberikan pengabdianya

kepada negara.

“Mungkin, memang sudah menjadi tugas kami, karena sudah memilih profesi kesehatan. Maka Insya Allah, harapan untuk memberikan yang terbaik itu sudah menjadi tujuan bersama dan akan kami usahakan selalu,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing (F-PG), Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso (F-PD), dan beberapa Anggota BURT DPR RI, diantaranya Rendy M. Affandy Lamadjido (F-PDI Perjuangan), Rita Zahara (F-Gerindra), Sartono (F-PD), dan Refrizal (F-PKS). ■ (nt/sj)



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Tidak Jaminan Netral Pejabat Gubernur dari Non TNI/Polri

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan jika soal netralitas itu tidak ada jaminan meski dari bukan TNI/Polri. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pro kontra pejabat tinggi TNI/Polri menjadi pejabat (Pj) Gubernur, yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoko Kumolo.

Menurut Bambang, tak ada jaminan netralitas bisa dijaga meski pejabat kepala daerah bukan berasal dari TNI-Polri. “Soal netralitas TNI/Polri menjadi Pj gubernur itu kan masih *debatable*. Lalu, apakah kalau bukan dari TNI/Polri ada jaminan? Jadi, masalah netralitas itu masih pro dan kontra,” tegas politisi Golkar itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Namun demikian menurut mantan Ketua Komisi III DPR itu, saat ini pemerintah harus mengambil langkah untuk meredam spekulasi tersebut. Bamsoet sendiri yakin pemerintah akan mendengar aspirasi publik dalam menunjuk pejabat sementara kepala daerah dalam Pilkada 2018.

“Jadi, spekulasi atau pro dan kontra itulah yang harus diminimalisasi oleh pemerintah, dan pemerintah sekarang sudah mendengar aspirasi publik dan mengambil langkah-langkah untuk yang meminimalkan kegaduhan politik,” katanya.

Diketahui, sebelumnya dua perwira tinggi Polri yaitu Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. ■^(sc)

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si(Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Mujiono
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Fadli Zon Desak Pemerintah Ubah Haluan Prioritas Pembangunan

Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang menimpa belasan ribu anak-anak dan balita di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.

“Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?” tandas Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Pimpinan DPR Korpolkam ini, sejak pertengahan tahun lalu data menunjukkan tingginya gizi buruk kronis yang menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Bukan hanya di Asmat, angka gizi buruk di Pulau Jawa juga masih tinggi. Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.

“Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan.” ia menegaskan.

Diingatkan kembali, salah satu agenda Nawacita adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi, tidak seharusnya pembangunan sumber daya manusia ini dikesampingkan di belakang pembangunan fisik, di bawah pembangunan infrastruktur.

“Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat. Ekseks belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak. Contohnya, KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat,” tandas



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Gizi buruk ini kenyataan di depan mata, sementara kebutuhan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang. Pemerintah seharusnya segera ubah haluan prioritas pembangunan

politisi F-Gerindra itu.

Pembangunan infrastruktur, sebut Fadli, telah membuat pemerintah abai persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi masyarakat. Laporan Global Nutrition menunjukkan Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara

negara-negara ASEAN lain. Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.

Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun. Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang.

“Itu sebabnya, Bank Dunia menyebut dampak malnutrisi berimplikasi pada kehilangan 2-3 persen PDB Indonesia. Jika nilai PDB Indonesia atas Harga Dasar Berlaku (AHDB) mencapai Rp 12.406,8 triliun, maka kasus gizi buruk berpotensi memangkas hampir Rp 372 triliun. Jadi, implikasinya sangat besar bagi perekonomian kita di masa mendatang. Itu pula sebabnya sejak lama saya sekali lagi selalu mengingatkan, dahulukan pembangunan manusia Indonesia, bukan pembangunan jalan tol,” ujarnya.

Fadli menegaskan, seharusnya yang dibangun prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua. Dari data yang didapatkan, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Dengan demikian, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB.

“Penanganan KLB yang saat ini telah melibatkan berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, saya kira ke depan perlu dipikirkan bagaimana segera memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar kesehatan di Papua. Selain itu, penanganan gizi buruk tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, perlu dipikirkan edukasi efektif pada masyarakat di sana. Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah,” pungkasnya. ■ (mp/sf)



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Pemerintah Diminta Rancang Kebijakan Komprehensif Atasi KLB Papua

Ada persoalan-persoalan yang harus segera ditangani oleh pemerintah terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Campak dan Gizi Buruk yang terjadi di Papua. Dalam Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dengan pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat menyatakan, bahwa pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi KLB tersebut.

“DPR juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan otonomi khusus Papua, khususnya terkait penggunaan dana otonomi khusus untuk kepentingan yang sangat nyata dampaknya bagi masyarakat,” ucap Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).

Fahri juga menyampaikan apresiasi DPR terhadap pemerintah, atas respon cepat pemerintah dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Dan DPR akan

mendukung rencana kerja pemerintah sebagai tindak lanjut tanggap darurat dalam mengatasi berbagai permasalahan di Papua, khususnya di kabupaten Asmat.

“Melalui tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi, DPR meminta pemerintah untuk memastikan imunisasi-vaksinasi bagi seluruh anak di Provinsi Papua dengan mobilisasi dan pendampingan dari tenaga kesehatan yang lebih besar,” ujarnya.

DPR berterima kasih kepada lembaga agama dan lembaga adat di Asmat, khususnya yang telah membantu sejak

proses identifikasi persoalan hingga menemukan solusinya dan mendampingi masyarakat, sambung Fahri.

“Kita telah membuat mapping persoalan yang sangat komprehensif, meskipun ada beberapa isu-isu yang sensitif atau politis. Ada banyak sekali pekerjaan rumah, salah satunya adalah pada level regulasi, dimana masih banyak masalah yang dapat berefek pada institusi dan mengenai metode penyaluran dana yang begitu besar, tetapi penyalurannya tidak sampai pada tujuannya,” pungkasnya

■ (dep/sc)

DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Dana Otsus

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung sikap pemerintah untuk segera mengevaluasi efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sebab, dana otsus yang digelontorkan pemerintah cukup besar, namun belum membawa dampak yang signifikan.

“Saya setuju langkah Wapres JK untuk mengevaluasi dana otsus, karena sudah banyak prioritas yang diberikan namun belum tepat sasaran,” ungkap Taufik kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Taufik menuturkan, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otsus yang tak sedikit. Dana tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat

khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, pemanfaatannya belum dirasakan oleh masyarakat di daerah penerima dana otsus, terutama di Asmat yang belum lama ini mengalami Kejadian Luar Biasa gizi buruk dan penyakit campak.

“Coba cari akar permasalahannya dulu. Silahkan saja lembaga penegak hukum bersama pemerintah melakukan evaluasi, jadi kalau ada penyimpangan yah segera diluruskan,” imbuhnya.

Politisi dari F-PAN ini juga menilai, pengelolaan dana otsus harus dilakukan dengan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Menurutnya, jika dalam evaluasi ditemukan penyimpangan maka pemerintah harus bertindak tegas.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana otsus perlu



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

foto: Inan Armanias/Inr

dievaluasi menyeluruh, untuk memastikan apakah penggunaan dana itu tepat sasaran, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan. Adapun daerah penerima dana otsus, yaitu Papua, Aceh dan Yogyakarta.

Diketahui, Kementerian Keuangan mencatat dana otsus di APBN 2017 sebesar Rp 19,5 triliun. Sementara itu, di APBN 2018 angkanya naik menjadi Rp 21,1 triliun. ■ (ann/sc)

Alih Fungsi Lahan Pelabuhan Tradisional Kupang Harus Maksimal

Alih fungsi lahan peruntukan pelabuhan tradisional untuk para nelayan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) harus berfungsi maksimal. Pelabuhan di Teluk Kupang ini sebenarnya sudah menjadi pelabuhan rakyat sejak lama. Pemerintah Provinsi NTT sudah mengajukan usul pembangunannya secara permanen. Infrastruktur pelabuhan tradisional ini juga harus mampu mengatasi kendala teknis berupa gelombang ombak yang tinggi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengungkapkan hal ini di Kupang, NTT, Rabu (31/1). Rencana pembangunan pelabuhan tradisional ini harus dimatangkan kembali, sehingga bisa dimanfaatkan para

nelayan dengan baik. “Untuk pelabuhan tradisional harus dipertimbangkan bagaimana mengatasi ombak yang besar pada saat musim ombak tinggi yang terjadi pada sekitar 2-3 bulan setiap tahunnya,” ujarnya usai meninjau lokasi yang sedang dilanda ombak tinggi.

Michael menambahkan, dengan teknologi breakwater berupa batu-batu beton maupun pembatas mengelilingi dermaga diharapkan bisa mengatasi kendala teknis berupa ombak besar yang memerlukan biaya tinggi. Diharapkan dalam setahun pelabuhan ini bisa dimanfaatkan para nelayan sampai sepuluh bulan setiap tahunnya.

“Jangan sampai 4 bulan tak terpakai, bisa mangkrak itu. Jadi memang harus ada perencanaan yang matang dengan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan tradisional yang ada di tempat itu. Karena memang tidak mungkin relokasi karena seluruh Teluk Kupang mengalami hal yang sama,” tutur



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena saat memimpin kunjungan spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

anggota F-PD tersebut.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT Ande Jehalu yang memaparkan bahwa rakyat NTT sudah sejak lama memanfaatkan lokasi tersebut untuk pelabuhan.

“Lokasi ini sebenarnya sudah lama sejak Kota Kupang ada, memang masyarakat sudah terbiasa dengan lokasi itu kalau memang saat kunjungan anggota Komisi IV ketika gelombang tinggi, tapi keadaan seperti ini sampai Februari saja,” ujar Ande.

Tim meninjau tiga titik alih fungsi yang kesemuanya di wilayah Teluk Kupang yaitu titik eksistensi Dermaga Nelayan/Pelabuhan Rakyat, tempat pelelangan ikan Kota Kupang serta pengembangan Pantai Lasiana. ■(raj/sc)



Foto: Regini/hr

Penegak Hukum Harus Cermat Tangani Konflik Tanah

Konflik tanah yang sering mempertentangkan antara rakyat kecil dengan penegak hukum selalu memunculkan oknum-oknum yang merekayasa kasusnya. Rakyat kecil selalu dikalahkan, karena tak memiliki akses dana dan hukum yang memadai. Konflik tanah harus dicermati oleh penegak hukum dan tak boleh mengorbankan rakyat kecil.

Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai menerima pengaduan masyarakat di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1). Pernyataan Arteria ini merespon pengaduan masyarakat di Pekanbaru, Riau yang tanahnya dirampas perusahaan swasta dengan membawa-bawa nama pejabat tinggi negara. Kasus yang sama juga disampaikan oleh warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan yang rumahnya minta dikosongkan oleh aparat TNI.

“Kasus tanah di Pekanbaru merupakan potret buram penegakan hukum di sektor pertanahan. Berulang kali saya sampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua MA untuk mencermati betul perkara hukum tanah. Tidak boleh sertifikat dianggap alat bukti yang sah begitu saja. Apalagi, sertifikat itu dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat banyak,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Penegak hukum yang menangani sengketa tanah yang melibatkan masyarakat banyak hendaknya tidak hanya terpaku pada sertifikat sebagai alat bukti. Sejarah terbitnya sertifikat itu harus dicermati dan diteliti dulu. Jangan karena tak memiliki sertifikat, rakyat kecil dikriminalisasi, sementara pejabat kantor pertanahannya tidak diproses hukum. Arteria pun mengusulkan agar Komisi III meninjau kasus tanah di Pekanbaru ini yang mencapai luas 400 hektare. Warga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi desakan dan ancaman terus menimpa warga setempat untuk segera mengosongkannya.



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

Foto: ssparelli/hr

“Kasus tanah di Tanah Kusir juga minta Panglima TNI mau menunggu proses hukum yang tidak lama lagi. Ini harus dihargai. Tundalah eksekusi, karena yang dieksekusi adalah keluarga prajurit yang nama orangtuanya ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya harapkan juga Polri hadir menjadi polisi pejuang. Kapolri selalu menyerukan adanya restoratif justice yang mensyaratkan mencari kebenaran sejati atas sebuah kasus. Carilah akar masalahnya, ujar politisi dari dapil Jatim VI ini.

Rakyat kecil pemilik tanah harus diberi ruang yang sama untuk membuktikan kepemilikan dan mendalilkan kebenarannya. Bila dalilnya benar menurut hukum, bahkan menjadi temuan hukum, maka Polri harus hati-hati menyikapi. ■(mb/sc)

DPR Minta Pemkot Palopo Perketat Pengawasan Pembangunan

Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Kota Palopo untuk memperketat pengawasan terhadap proses pembangunan di Kota Palopo. Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, beberapa proses pembangunan yang menggunakan dana APBN diberbagai daerah, kadang terlihat dipaksakan. Sehingga upaya yang awalnya untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.



Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis

Foto: Iwan Armanias/Inr

“Tidak kita pungkiri beberapa anggaran untuk pembangunan fasilitas umum yang awalnya digelontorkan untuk menambah pelayanan kepada masyarakat, justru tidak maksimal. Bahkan sebagian malah tidak difungsikan sebagaimana mestinya,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu saat pertemuan dengan Pemerintah Kota Palopo di Bandara Bua, Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/1).

Lebih lanjut, Fary mengatakan, bukan hanya itu saja, dirinya sudah melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan ke beberapa daerah, dan melihat langsung beberapa fasilitas umum yang dibangun dengan dana APBN belum difungsikan dengan baik,

bahkan kalau pun difungsikan itu juga tidak maksimal.

“Beberapa fasilitas umum di masyarakat kalau pun difungsikan tidak maksimal. Kalau kita persentase hanya dikisaran 30 persen dan inilah yang banyak terjadi,” jelas politisi asal Dapil NTT itu.

Sementara ditempat yang sama, Walikota Palopo Muhammad Judas Amir mengatakan, untuk pengawasan tetap dilaksanakan, dan akan berusaha agar fasilitas umum yang dinantikan dibangun di Kota Palopo akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Ia yakin, dirinya paham betul apa yang menjadi hal dasar dan menjadi keinginan masyarakat Kota Palopo, termasuk kebutuhan terminal angkutan darat yang skala besar.

“Dengan keberadaan terminal itu kedepannya kawasan Terminal Dangerakko akan menjadi terminal bantu, tentunya juga akan mengurangi kesemrawutan kendaraan disekitar terminal,” pungkasnya. ■ (in/sj)

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Diharapkan Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi berharap Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Malang memenuhi kebutuhan Semen (sperma) Sapi dalam negeri terlebih dahulu, baru lakukan impor. Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau BBIB Singosari, di Malang, Jawa Timur, Selasa (30/1).



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari di Malang

“Kedatangan kami meninjau Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Malang ini untuk mengetahui produksi dari Semen (sperma) Sapi dengan kualitas terbaik. Serta sejauhmana BBIB untuk membantu pemerintah memenuhi target swasembada protein hewani. Kami sudah menyaksikan langsung teknologi yg cukup tinggi dalam proses inseminasi buatan di sini, dan hasilnya pun sangat baik,” ujar Viva Yoga.

Hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah produksi sapi pejantan tangguh dengan bobot yang sangat besar dan kualitas prima. Tidak hanya itu, permintaan ekspor Semen ke negara-negara lain seperti Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Kazaktan dan lain-lain pun meningkat. Bahkan tidak jarang BBIB Singosari ini mendapat kunjungan dari negara-negara sahabat untuk belajar atau berlatih seputar inseminasi buatan.

Meski demikian, terkait dengan program Ekspor Semen Sapi ke negara-negara sahabat, Yoga, begitu ia biasa disapa, meminta agar BBIB lebih mengutamakan kebutuhan lokal dan dalam negeri terlebih dahulu. Jika hal itu sudah terpenuhi semua, maka barulah BBIB bisa melakukan ekspor.

Pasalnya saat ini jumlah Balai Besar seperti ini masih sangat kurang. Peternak Indonesia masih membutuhkan benih

atau Semen Sapi dengan kualitas unggul. Tidak hanya itu, awal didirikannya BBIB ini salah satunya adalah untuk membantu meningkatkan produksi sapi dalam negeri, sehingga bisa terwujud swasembada protein hewani. Pada akhirnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan protein hewani sendiri, dan tidak lagi melakukan impor daging. ■ (ayu/sc)

Penyaluran KUR Perlu Survei Memadai

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dilakukan oleh perbankan perlu disurvei secara memadai. Selama ini belum jelas, kemana dana KUR mengalir. Bank penyalur hanya mengejar target penyaluran, tanpa selektivitas penerima KUR itu sendiri.

Demikian dikemukakan Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Indah Kurnia saat mengikuti rapat kerja dengan Gubernur BI, Deputy OJK, dan Deputy Kemenkop UKM di ruang KK I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Indah mengaku tak bangga ketika Pemerintah Daerah dan kantor cabang Bank penyalur KUR menyampaikan serapan KUR yang sampai 90-100 persen. "Siapa debitur yang sesungguhnya menerima KUR selama ini. Masih jadi pertanyaan mendasar," katanya.

Menurut Anggota F-PDI Perjuangan itu, boleh jadi debitur atau penerima KUR adalah selalu orang yang sama. "Kadang yang sudah jadi nasabah ditambah lagi kreditnya. Yang penting katanya bank sudah mencapai target penyaluran KUR. Tapi, tepat sasaran dari KUR itu tidak pernah dilakukan survei. Apakah penerima KUR itu orang-orang yang sudah mampu naik kelas dan bisa keluar dari komunitas UMKM," tutur Indah.

Selain masalah survei KUR, yang perlu dibenahi pula

adalah mindset para pemangku kepentingan dari penyelenggara negara sendiri. Banyak para wirausahawan pemula sudah siap dengan tempat, SDM, dan alat produksi. Tapi, tak kunjung mendapat izin dari Pemda.

"Ini jadi persoalan sendiri. Bukan saja mindset masyarakatnya yang perlu dibenahi, tapi mindset pemangku kepentingan atau penyelenggara negara. Izin usaha saja kerap tak keluar dengan alasan tidak jelas. Padahal, kesiapan usaha sudah ada," keluh politisi dari dapil Jatim I itu.

Ditambahkannya, RUU Kewirausahaan Nasional yang sedang dirumuskan ini semoga menjawab semua problem pengembangan UMKM di Tanah Air. Bagaimanapun usaha mikro harus dinaikkan kelasnya menjadi pengusaha kecil. Dari pengusaha kecil menjadi kelas menengah, bahkan menjadi pengusaha besar yang tak tergolong UMKM lagi.

"Mengapa UMKM tidak bisa meningkat, berarti ada yang salah dari pengembangannya. Mudah-mudahan RUU ini menjadi terobosan yang bagus. Kita harus upayakan agar usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil. Dari usaha



Anggota Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Indah Kurnia

Foto: Anindri/In

mikro ke usaha kecil saja gap-nya masih terlalu jauh," kilah Anggota Komisi XI ini. ■ (mb/sf)

Siapa debitur yang
sesungguhnya menerima
KUR selama ini. Masih jadi
pertanyaan mendasar

DPR Apresiasi Persiapan Pemprov Sumsel Hadapi Asian Games 2018

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi Djoko Udjiyanto, mengapresiasi kerja keras Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dalam mempersiapkan Asian Games 2018. Asian Games 2018 akan dilaksanakan di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan pada 18 Agustus mendatang.

“Kami sudah meninjau fasilitas dan venue untuk Asian Games.

Alhamdulillah selalu ada kemajuan, tak ada lagi yang dikhawatirkan. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi kerja kerasnya Pemda, karena tanpa ada keseriusan dan kerjasama, tidak mungkin akan terlaksana,” ungkap Djoko saat gelar diskusi di Griya Agung, Palembang, Sumsel, Kamis, (25/1).

Namun, politisi partai Demokrat itu tetap memberikan pesan, meski progres pembangunan venue sudah sedemikian baiknya, Pemda Sumsel tetap harus disiplin menyediakan fasilitas sesuai standar internasional. Ia tidak menginginkan standar yang tidak sesuai, sehingga nantinya malah menjadi alasan dan kambing hitam bagi para atlet yang

kalah bertanding.

“Semua harus sesuai, tadi kita lihat cabang olahraga bowling yang sudah di test oleh konsultan bowling dan dinyatakan sudah setaraf internasional. Semua venue cabang olahraga harus seperti itu,” jelas Djoko.

Selain mengingatkan soal standar internasional, tim Komisi X juga memberikan pesan kepada Pemda Sumsel mengenai daerah di sekitar kawasan Jakabaring Sports City (JSC). “Lingkungan harus ditata juga, agar nantinya JSC menjadi tempat yang indah di samping untuk sarana olahraga juga bisa menjadi sarana pariwisata serta meningkatkan gairah olahraga di provinsi Sumsel,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Sumsel

Nasrun Umar melaporkan saat ini progres pembangunan JSC sangat menggembirakan. Mulai dari venue bowling, dayung, menembak, volley pantai, panjat tebing hingga atletik sudah rampung.

“Bahkan di JSC telah berdiri Politeknik Olahraga Indonesia, dan ada juga 5 tempat ibadah berdampingan. Ini menunjukkan bahwa Sumsel adalah daerah yang zero konflik. Oleh sebab itulah, banyak event internasional digelar di sini,” paparnya.

Dalam rangka persiapan ini, diakuinya banyak dana APBN yang dikucurkan kepada Pemprov Sumsel hingga mencapai Rp 68 triliun. Ada proyek pembangunan LRT, underpass dan fly over.

“Tapi bagaimanapun kami tetap butuh support Komisi X. Kunjungan ini sangat positif karena paling tidak kami dikoreksi dan diberi petunjuk, saran dan masukan untuk penyempurnaan agar Asian Games terlaksana dengan baik,” tutupnya. ■(nm/sj)



Tim Kunspek Komisi X dipimpin Ketua Komisi X Djoko Udjiyanto meninjau fasilitas dan Venue Asian Games 2018 di Palembang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meninjau persiapan atlet cabang olahraga Pencak Silat dan Voli Pantai untuk Asian Games 2018 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/01/2018)

Foto: Japanti/In

DPR Optimis Pencak Silat dan Voli Pantai Raih 3 Besar

Komisi X DPR RI meninjau persiapan atlet cabang olahraga Pencak Silat dan Voli Pantai untuk Asian Games 2018 di Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/1). Selain memantau kesiapan atlet, Tim Komisi X juga memantau lokasi latihan. Dari hasil tinjauan, Komisi X optimis, cabor Pencak Silat dan Voli Pantai dapat meraih peringkat 3 besar pada Asian Games 2018.

“Sejauh ini persiapannya cukup baik, target kami menjadi 10 besar. Namun kalau kita lihat persiapan para atletnya, kami optimis dapat meraih 3 besar pun bisa. Karena potensi atlet ini luar biasa dan banyak juga atlet yang menang secara nasional,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin kunspek ini di lokasi latihan.

Politisi F-PKS itu juga berharap dari kedua cabang olahraga tersebut dapat banyak menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Terlebih lagi

Pencak Silat, yang merupakan olahraga dan budaya asli Indonesia, jadi sudah semestinya Indonesia mendapatkan emas di cabang olahraga tersebut.

“Kita dapat lihat tadi Pencak Silat luar biasa latihannya. Bahkan saat kita tanya mereka ingin menargetkan berapa medali, mereka dengan percaya diri dan optimis menjawab 4 medali. Kami juga mendorong terus, agar minimal mendapatkan 8 medali dari 16 nomor,” harap Fikri.

Komisi X juga berharap agar Voli Pantai dapat memberikan penampilan terbaiknya agar menyumbangkan

medalinya. “Kita juga lihat tadi voli pantai sudah siap tapi sementara pihak pusat pelatihan Voli Pantai belum dapat menargetkan emas, tapi mereka sudah biasa mendapatkan perak pada event-event internasional, itu kan artinya tim voli harus lebih semangat sedikit lagi agar bisa mendapatkan emas,” dorong Fikri.

Meski seluruh atlet terlihat siap, namun menurut politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu ada satu kendala yang dihadapi oleh atlet tersebut, yaitu miskin try out.

“Mereka itu miskin event seperti try out di tempat atau negara lain, sehingga pengalaman mereka bertanding itu ternyata kurang. Bahkan yang mengkhawatirkan tidak mencapai target yang diinginkan. Padahal try out ini penting agar tahu pola permainan di luar negeri itu seperti apa,” kritisi Fikri.

Kunspek kali ini juga diikuti oleh beberapa Anggota Komisi X, diantaranya Esti Wijayati, Suryo Alam, Nuroji, Rinto Subekti, Laila Istiana, Dewi Coryati, Lathifah Shohib dan Arzeti Bilbina. ■ (juy/sf)

Indonesia Targetkan 7 Besar di Asian Games 2018

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menargetkan Indonesia bisa mencapai peringkat 7 besar pada Asian Games 2018, dimana sebelumnya Indonesia hanya menargetkan 10 besar. Apalagi, menjadi tuan rumah even olahraga se-Asia itu merupakan momentum 40 sampai 50 tahun sekali.

“Saya mengharapkan Indonesia sebagai tuan rumah bisa meraih tujuh besar dalam kejuaraan Asian Games yang tidak lama lagi terselenggara, ini sebagai momentum 40 atau 50 tahun sekali,” ucapnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/1).

Politisi F-PG itu memastikan, terkait target pencapaian ini, pihaknya sudah memahaminya dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dalam rapat kerja yang lalu. Ferdi menambahkan, pihaknya juga telah menghitung waktu persiapan yang tersisa dengan keseriusan yang lebih mendalam para atlet untuk berlatih dengan giat dan keyakinan untuk meraih target.

“Setidaknya, jika saya cermati untuk meraih target 7 besar atlet Indonesia harus mendapatkan kurang lebih 21 medali emas dari keseluruhan cabang olahraga yang akan bertanding,” imbuh Ferdi.

Terkait venue, Ferdi pun meyakini sejumlah venue cabang olahraga yang nantinya akan digelar di Jawa Barat relatif sudah bisa digunakan, kendati ada hal-hal yang harus di perbaiki. Namun dengan target waktu sekitar 6 bulan lagi, ia yakin semua venue akan siap.

“Tapi kita perluantisipasi karena tidak semua venue yang akan digunakan bisa lulus test event, sehingga perlu diantisipasi. Jangan sampai nantinya ada persoalan atau kejadian yang tidak diinginkan dalam proses penyelenggaraan,” pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Ida Bagus Putu Sukarta menilai kondisi beberapa venue yang akan digunakan harus mendapatkan renovasi. Salah satunya Stadion Bandung Lautan Api, dimana kursi penonton, ruang tunggu, hingga rumputnya harus segera diperbaiki untuk digunakan cabang olahraga sepak bola. Politisi F-Gerindra itu pun menekankan, kebersihan venue pun harus diperhatikan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Kartiwa, memastikan bahwa Jawa Barat siap dalam pelaksanaan Asian Games 2018. Delapan wilayah di Jawa Barat yang menjadi venue pada Asian Games 2018 diantaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sabang, Kabupaten Majalengka, Bandung, Kota Bandung dan Subang. Sementara, sejumlah cabang olahraga yang akan bertanding di Jawa Barat diantaranya cabang olahraga sepak bola, paragliding, canoe slalom, cycling roud race route, hingga cycling MTB. ■ (mi/sj)



Foto: Rami/hr



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (tengah) saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/1)

Pemerintah Diminta Jelaskan Tujuan Holding Migas

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan kepada DPR tujuan holding migas yang didasari dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016. Apalagi, Menteri Rini mengatakan, penggabungan perusahaan BUMN, tidak memerlukan persetujuan DPR RI.

“Kami sebagai wakil rakyat harus tahu alasan dan dasar pemerintah terkait dengan holding BUMN yang sudah dan akan terbentuk, yakni tambang serta minyak dan gas. pembentukan holding Migas,” ungkap Bowo di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Lebih Inajut, politisi F-Golkar itu mengatakan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang pengawasan dan penganggaran, DPR berhak tahu rencana kerja pemerintah.

“Kami punya wewenang sebagai pengawas. Apapun itu kami harus tahu. Maka dari itu, saya harap Menteri BUMN untuk menjelaskan. Soal disetujui atau tidak itu yang kedua,” imbuh politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Kementerian BUMN terus mematangkan rencana pembentukan holding BUMN di sektor minyak bumi dan gas (migas) berdasarkan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016.

Deputi Bidang Usaha Pertambang-



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso

Foto: amabri/hr

an, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyebutkan, dalam holding tersebut Perusahaan Gas Negara (PGN) akan berubah statusnya menjadi anak perusahaan Pertamina. ■ (rum/sj)



Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto

Foto: keranu/hr

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1). Terhadap hal tersebut, Komisi VII DPR sangat mendukung upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia itu.

DPR Dukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport

Perundingan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan, diantaranya adalah divestasi 51 persen saham Freeport untuk kepemilikan nasional, dan Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun. Dengan demikian, penerimaan negara akan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.

“Komisi VII menilai progresnya sudah berjalan dengan cukup bagus. Soal divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51 persen, saat ini domainnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Urusan negosiasi oleh Kementerian ESDM sekarang sudah selesai,” ucap Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto.

Terkait masalah kewajiban Freeport untuk membangun smelter, Komisi VII DPR sepakat apabila dilakukan setelah keluar Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan kemudian keluar perpanjangan kontraknya.

“Setelah diperpanjang, barulah mereka bisa membangun smelter. Karena kalau tidak dari mana uangnya. Kalau belum diperpanjang kontraknya, maka tidak ada pihak yang akan memberi bantuan keuangan,” ujarnya.

Komisi VII DPR berharap agar semuanya dapat segera selesai, sehingga bisa keluar IUPK nya, dan pembangunan smelter bisa secepatnya direalisasikan. “Jadi posisi kami adalah mendukung negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah,” tandas politisi F-PG itu. ■ (dep/sj)

Sungai Kalimati Harapan Kebutuhan Air Baku Masyarakat Sidoarjo

Sungai Kalimati di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang selama ini hanya diandalkan untuk irigasi pertanian, akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi PDAM Delta Sidoarjo. Dengan pemanfaatan ini, diharapkan kebutuhan air baku untuk Kabupaten Sidoarjo dapat terpenuhi.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat meninjau Pembangunan Long Storage Sungai Kalimati di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (26/1). Dalam kunjungan yang diikuti beberapa Anggota Komisi V itu, juga hadir Kepala BBPJN VII Surabaya, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Pengelola Data Pengawasan Inspektorat V dan Kepala Kantor SAR Surabaya.

dibangunnya Long Storage Kalimati, kebutuhan air baku PDAM Delta Tirta Sidoarjo diharapkan dapat terpenuhi,” kata Sigit.

Pemanfaatan Sungai Kalimati ini, dimanfaatkan dengan cara dibangun Long Storage (bangunan penahan air) di sungai sepanjang kurang lebih 5 kilometer. Rencananya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas bakal membangun Long Storage Kalimati dengan 3 kolam penampungan. Setiap kolam akan

Kabupaten Mojokerto sangat langka. Karena, kedua wilayah ini tidak memiliki sumber-sumber air seperti sumber air pegunungan.

“Kita kemari atas inisiatif dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk memanfaatkan sungai yang lama tidak berfungsi ini karena sebagian dimanfaatkan masyarakat untuk membuat keramba. Dari pihak Kementerian PU berinisiatif membantu Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan cadangan air baku baik untuk PDAM maupun untuk kegiatan lainnya, sekarang sudah ada pemenang tendernya dan akan dikerjakan dalam program 2-3 tahun,” jelas Sigit.

Dalam pemampirannya dihadapan Anggota Dewan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Fauzi menjelaskan bahwa proyek Sungai Kalimati ini rencananya 3 tahun dan di tahun 2017 sudah penandatanganan kontrak di akhir tahun.

“Kemudian kita harapan nanti di akhir tahun 2019 Desember sudah selesai dan dikerjakan oleh BUMN Nindya Karya dan pekerjaan ini didukung oleh konsultan supervisi yang membawahi dua kabupaten, yaitu Sidoarjo dan Mojokerto,” jelas Fauzi.

Sebagaimana diketahui, keberadaan Sungai Kalimati di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo yang selama ini hanya diandalkan untuk air irigasi persawahan, bakal dimanfaatkan menjadi air baku PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Selain itu, PDAM Kabupaten Mojokerto juga bakal memanfaatkan air dari Sungai Kalimati itu lantaran

sebagian wilayah sungai itu berada Kabupaten Mojokerto. ■ (hr/sj)



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dan Tim Kunker Spesifik saat meninjau Pembangunan Long Storage Sungai Kalimati di Kabupaten Sidoarjo, Jawa

“Kebutuhan air baku PDAM Sidoarjo setiap tahun semakin meningkat. Hal ini karena semakin bertambahnya jumlah penduduk Sidoarjo. Dengan akan

dibangun spillway (pintu pengatur air) dengan lebar Long Storage 100 meter.

Sigit mengakui, sumber air baku minum di Kabupaten Sidoarjo dan



Tim Kunspek MKD DPR RI foto bersama Kapolda Kalimantan Barat

Foto: Kreano/br

MKD Sosialisasi Produk Hukum dan Perundang-undangan di Polda Kalbar

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melakukan sosialisasi Produk Hukum dan Perundang-undangan DPR RI dalam lingkup tugas Polri, menyangkut kode etik dan kinerja MKD ke Polda Kalimantan Barat.

“Ini memang program MKD dalam rangka menindak lanjuti MoU kita dengan Polri,” ujar Ketua Tim Kunjungan Spesifik MKD Adies Kadir di Polda Kalimantan Barat, Rabu (31/1).

Kerja sama di sini adalah dalam rangka MKD meminta dukungan penuh dari Lembaga Kepolisian, khususnya jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat ketika MKD melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang bersinggungan

langsung dengan tugas-tugas Kepolisian.

Menurut Adies, sinergitas antara MKD dengan Polri dibentuk agar dapat membantu pada saat ada anggota DPR yang melakukan pelanggaran etika di daerah Polda-Polda terkait, termasuk juga persamaan persepsi tentang pelanggaran hukum yang menjadi ranah Polisi dan pelanggaran kode etik yang menjadi ranah MKD.

Seperti diketahui bahwa tugas MKD

dalam menegakkan kode etik yaitu melakukan penyelidikan dan verifikasi perkara pengaduan/perkaratan tanpa pengaduan, melakukan kerja sama dengan lembaga lain, dan memanggil pihak terkait. Dalam hal tersebut ada sistem pencegahan dan sistem penegakkan, dan sosialisasi ini salah satu bentuk dari sistem pencegahan yang ada di MKD.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunjungan Spesifik MKD disambut langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat Didi Haryono dan dihadiri juga oleh beberapa Kapolres dan Kapolsek dari Kalbar. ■ (en/s)

Tegakkan Kode Etik MKD Kerja sama Dengan Penegak Hukum

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) proaktif dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam penegakan kode etik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, MKD berwenang memanggil pihak-pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain, seperti penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding saat memimpin kunjungan Tim MKD ke Mapolresta Kota Bogor, Senin (29/1) dalam rangka mensosialisasikan tentang tugas, fungsi, dan wewenang MKD.

“Berdasarkan Undang-Undang, MKD secara institusi sudah bertemu dan bersepakat dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya,” kata Sudding.

Ia mengaku sudah ada satu kerja sama dengan Kapolri dan Jaksa Agung. “Aada suatu kerja sama yang terbangun dan dalam waktu dekat akan ditandatangani, yaitu tentang MoU antara pihak Kapolri dan Jaksa Agung. Dimana poin-poinnya telah disepakati para pihak. Isinya adalah kerja sama data dan informasi dalam

proses penyelidikan perkara terkait pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI,” papar politisi Hanura ini.

Namun lanjutnya, dalam prakteknya selama ini, MKD telah melakukan kerja sama penanganan perkara dengan Direskrim Mabes Polri dan beberapa Polda seperti Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Bali, dan Polda Sulawesi Selatan, termasuk Polres Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

“Kerja sama ini didasarkan dengan adanya pengaduan-pengaduan yang masuk ke MKD, kami melakukan proses penyelidikan dimana Locus Delicti terjadi maka MKD akan turun melakukan proses penyelidikan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan dapil Sulawesi Tengah ini berharap, untuk menjaga kehormatan institusi DPR beserta anggotanya, jajaran Polresta

Bogor maupun Polres Kabupaten Bogor dapat melakukan koordinasi dengan MKD dan koordinasi dengan Mabes Polri jika diperoleh laporan atau pengaduan dari berbagai pihak terhadap anggota DPR RI, terkait dengan dugaan pelanggaran hukum dan/atau dugaan pelanggaran kode etik DPR. Koordinasi ini penting agar terjadi sinergitas penanganan perkara yang dilakukan oleh masing-masing institusi.

Dijelaskan Sudding, ketika ada anggota dewan melakukan suatu pelanggaran, karena ini sudah diatur sedemikian rupa dalam kode etik baik berhubungan dengan mitra kerja maupun aparat penegak hukum, maka seorang anggota dewan dilarang melakukan intervensi dalam bentuk apapun dalam bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“MKD juga telah menjatuhkan sanksi-sanksi kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran etika. Kami tidak memandang apa dan siapa, betul-betul untuk menjaga harkat martabat dan keluhuran para anggota dewan dalam berinteraksi baik mitra kerja maupun masyarakat yang diwakilinya,” mantapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Kota Bogor Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya menyambut baik kunjungan Tim MKD DPR RI di Polresta Kota Bogor. “Ini merupakan penghormatan yang sangat tinggi bagi kami karena kunjungan kerja Tim MKD ke Kabupaten dan Kota Bogor bertempat di Polresta Kota Bogor,” ujarnya.

Sedangkan, bagi Kapolres Bogor AKBP Andi M. Dicky Pastika, sosialisasi yang dilakukan MKD ini untuk menyamakan persepsi, bagi para petugas di lapangan. Apabila nantinya ada pemeriksaan ataupun penggeledahan, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan MKD. ■ (as/ sr)



Tim MKD DPR ke Mapolresta Kota Bogor

Foto: Agung/ir



Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong (F-PAN)

“Jangan terlalu banyak diskusi, kerjakan, kerjakan dan kerjakan. Ini saya kira yang paling penting,” katanya ketika memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Idrus Marham di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Raker pertama dengan Menteri Sosial pengganti Khofifah Indar Parawansa kali ini beragendakan evaluasi pelaksanaan APBN 2017 dan isu-isu aktual bidang sosial. Selanjutnya Ali Taher menegaskan, meningkatkan anggaran bukanlah perkara yang sulit. “Tapi memberdayakan masyarakat itu jauh lebih sulit,” ungkap politisi PAN itu.

Dalam kesempatan itu, Anggota

DPR Harapkan Mensos Fokus Tangani Kemiskinan

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengharapkan sisa masa jabatan Menteri Sosial baru, Idrus Marham, yang tinggal satu tahun ini bisa menjawab berbagai isu penting terkait dengan politik penanganan kemiskinan.

Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyoroti data-data kemiskinan di seluruh Indonesia yang ternyata masih amburadul, padahal dulu pernah dicanangkan. Karena itu, dia mendesak Kemensos untuk evaluasi serempak data kemiskinan.

Menurut Muna, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kartu yang menarik banyak orang, karena terdapat KIP, KUBE, KIS dan lainnya. Padahal, program itu hanya boleh diterima oleh orang yang masuk data kemiskinan atau PKH.

“Kalau data itu diterima orang yang mampu, akan menjadikan iri orang miskin yang tidak mendapatkan berbagai fasilitas sosial itu,” jelas politisi F-Nasdem itu.

Sisi lain, kata Muna, jumlah E-warung yang masih sangat sedikit, banyak dikeluhkan oleh Dinas Sosial kabupaten/kota. Contohnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dari jumlah 91.081 penerima PKH, seharusnya ada sekitar

340 E-warung, tapi ternyata satupun belum ada.

“Ini sangat terkendala. Mohon program E-warung ini segera direalisasikan, sehingga setiap kabupaten bisa meng-cover E-warung tersebut,” tutur Muna.

Dalam paparannya, Mensos Idrus Marham menjelaskan pemutakhiran data fakir miskin. Tahun 2017 lalu, verifikasi dan validasi data penerima manfaat dengan target penerima Program Perlindungan Sosial yang belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 2.537.138 rumah tangga pada 7 kabupaten di 3 provinsi.

Kondisi saat, belum seluruh Pemda Kabupaten/kota melaksanakan kewajibannya untuk melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin. Kemampuan Kemensos untuk membantu verifikasi dan validasi dari anggaran pusat sangat terbatas, pada tahun 2018 hanya untuk 2,5 juta rumah tangga. ■ (mp/sj)

Atasi Gizi Buruk dengan Program Terpadu

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menyarankan kepada pemerintah dalam mengatasi penyakit cacar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, dengan menggunakan program terpadu.

Tidak hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan lain yang relevan dalam mengatasi kasus gizi



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

buruk. Selain itu, ia juga menganjurkan agar tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus tetapi harus perencanaan jangka panjang.

“Bila hanya rehabilitasi medik, itu hanya salah satu hal yang memang harus dilakukan saat ini, saat ada kejadian,” ujar Erma dalam keterangan tertulisnya kepada Parleментарia, Jumat (26/1).

Menurut Politisi Fraksi PPP itu, perencanaan jangka panjang harus menjadi solusi terhadap masalah gizi

buruk yang terjadi. Mengatasi dengan misi jangka panjang harus dilakukan secara terpadu, jika tidak kejadian gizi buruk akan kembali terulang.

Selain program secara terpadu, Erma mengatakan negara juga harus hadir secara paripurna bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya di Papua yang saat ini sedang terjadi kasus gizi buruk.

“Juga harus daerah-daerah khusus lain seperti wilayah kepulauan dan perbatasan dengan negara lain,” ungkap politisi asal

dakil Nusa Tenggara Barat itu.

Ermalena menilai kasus gizi buruk merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga masalah pola hidup, ekonomi, dan pendidikan.

“Masalah ekonomi dan pendidikan juga termasuk, misalnya pemahaman tentang memilih dan memberikan makanan pada anak, dan khususnya pada balita,” jelasnya. ■ (eko/st)

Jalur Masuk Barang di Priok Terkendala Pengolahan Data

Komisi XI DPR RI melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk memastikan jalur masuk barang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir, rombongan menemukan ada persoalan pengolahan data terhadap barang masuk sehingga barang yang masuk jalur merah sebanyak 9 persen. Ini harus segera diperbaiki.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafisz Tohir

Foto: Hendra Ibr

“Cukai selalu punya persoalan di dalam pengolahan data. Kita menyaksikan banyak barang yang masuk ke jalur merah sebanyak 9 persen. Ini perlu diketahui kenapa hal ini selalu terjadi berulang,” ungkap Achmad Hafisz Tohir usai melakukan peninjauan di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (29/1).

Politisi PAN ini menuturkan penumpukan barang di jalur merah ini semestinya dapat diminimalisir. Mengingat proses deteksi barang sudah bisa dilakukan saat perjalanan barang tersebut menuju pelabuhan sehingga penumpukan tidak akan terjadi.

“Karena selama diperjalanan, barang ini sudah bisa dideteksi, data sudah bisa dipelajari. Sehingga tidak perlu barang menumpuk di sini baru diselesaikan datanya. Ini yang membuat kinerja pelabuhan dan cukai agak sedikit memerlukan waktu dan tenaga. Ini mengganggu proses produksi dan investasi” ujar Achmad Hafisz Tohir.

Ia pun menaruh harapan agar Bea Cukai mampu menjadi ujung tombak negara dalam meningkatkan penerimaan negara dan melindungi negara dari barang luar. “Kami ingin melihat kinerja

yang sudah dilakukan Bea Cukai di Tanjung Priok karena ini pelabuhan terbesar. Kita ingin cukai ini ujung tombak negara. Ia melindungi warga negara dari serangan barang luar. Ini yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Besarnya peran Bea Cukai terhadap lalu lintas barang yang masuk, diharapkan mampu lebih mengutamakan kepentingan nasional di bidang perpajakan. “Kita terus meminta pada cukai harus kerja keras untuk melindungi kepentingan nasional kita,” tutupnya. ■ (hs/ss)

**Kita terus meminta
pada cukai harus kerja
keras untuk melindungi
kepentingan nasional kita**

Hati-hati Tentukan Perubahan Tata Ruang Wilayah

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menyatakan, perlu kehati-hatian dalam menentukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah Dangku menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan sampai justru melegitimasi suatu kelompok tertentu (pengusaha), namun pada akhirnya merugikan masyarakat.



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR Edhy Prabowo meninjau kawasan Dangku melalui helikopter di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

“Dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat dengan gamblang saya tanya, kalau kawasan ini berubah fungsi menjadi APL dibuka untuk masyarakat, teman-teman yakin tidak?, kemudian dijawab langsung oleh camat sudah disepakati bahwa akan dijaga sama-sama,” kata Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR meninjau kawasan Dangku melalui helikopter di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (30/1).

Menurut Edhy, tujuan dari kunjungan Komisi IV adalah untuk melihat lebih dekat, apa manfaat dari perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi lahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Dalam waktu dekat Komisi IV akan segera mengambil sikap.

“Tapi kami minta sekali lagi dari Kementerian LHK untuk meyakinkan kami bahwa keputusan ini harus diputuskan sesuai rekomendasi. Karena Komisi IV tidak mudah dalam mengambil keputusan, masih ada sembilan provinsi yang harus segera ditindak lanjuti perubahan RTRW-nya,” pungkas politisi F-Gerindra ini.

Selain itu, sebenarnya wilayah Dangku ini sudah lama dibahas anggota DPR periode lalu, namun sampai sekarang belum terealisasi. Informasi dari Tim Terpadu Kementerian LHK, keputusan perubahan peruntukkan RTRW sudah dinanti banyak pihak, terutama masyarakat. ■ (j/k/sc)

Tayangan *Online* Belum Tersentuh KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama ini belum menyentuh pengawasannya pada tayangan-tayangan *online* dan *streaming* di dunia maya. Pengawasan masih tertuju pada siaran TV dan Radio. KPI diharapkan membuka diri pada pengawasan tayangan online.

“Peran KPI ke depan perlu diperluas. Sekarang ini hanya menangani siaran terestrial. Kecenderungan masyarakat pada

tayangan terestrial akan turun. Mereka beralih ke *online* dan *streaming*. Kalau ini tidak menjadi domain KPI, maka lima tahun ke depan tugas KPI selesai,” kata

anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin di hadapan rapat Komisi I dengan KPI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

BURT Apresiasi Kerja Sama Jasindo dengan RSUP dr. M. Djamil Padang

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengapresiasi kerja sama Jasindo dengan RSUP dr. M. Djamil, Padang, Sumatera Barat. Kerja sama ini dilakukan untuk pengadaan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi para anggota dewan dalam mengakses layanan kesehatan VIP.

Demikian disampaikan Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso saat memimpin Tim BURT ke RSUP dr. M. Djamil di Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/1).

Agung menilai, Jasindo cukup selektif memilih RS provider yang bisa melayani para anggota dewan dengan baik. RS ini bertipe A yang memiliki fasilitas kesehatan yang sangat baik dan lengkap. Perlu diketahui, RSUP dr. M. Djamil sebenarnya belum menjalin kerja sama resmi dengan Jasindo. Ini adalah pra kerja sama yang membutuhkan tinjauan BURT.

“Kami menilai justru ini menarik, karena selama ini yang kita tinjau adalah rumah sakit yang sudah bermitra dengan Jasindo. Tapi ini baru mau bekerja sama. Ternyata Jasindo cukup baik dalam mencari mitra. Karena ini rumah sakit tipe A di Sumatera Barat dan Sumatera bagian Tengah, sebetulnya tidak perlu kami cek. Pasti semua sudah lengkap,” nilai Agung.

Siaran terestrial adalah tayangan TV berbasis transmisi satelit yang menggunakan gelombang radio dan ditangkap melalui pemancar. Kini, perkembangan siaran bisa bergeser ke dunia maya dengan menonton tayangan *online* atau lewat *streaming*. Kencenderungan peralihan masyarakat penonton perlu dicermati dan diawasi pula oleh KPI. Apalagi, kata anggota F-Gerindra ini, tayang *online* kian mudah diakses tanpa pengawasan.

“Kita harus bantu KPI dengan



Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso saat pertemuan dengan jajaran Direksi RSUP dr. M. Djamil Padang

Foto : smparati/ir

Anggota dari F-PD ini menegaskan, semua RS yang bertipe A mestinya menjadi RS provider bagi para anggota dewan. Selain punya fasilitas kesehatan yang lengkap juga punya SDM medis yang memadai.

“Begitu ada rumah sakit yang bagus, tentunya harus diajak kerja sama, karena Jasindo melayani Jaminan Kesehatan Utama bagi seluruh Anggota DPR dan keluarganya. Tentu harus bisa dilayani oleh rumah sakit yang paling bagus di kota itu,” harap Agung.

Dijelaskan Agung, sebelumnya Anggota DPR pernah menggunakan fasilitas inhealth untuk mengakaes

layanan kesehatan. Kemudian menggunakan Askes dan sempat menggunakan BPJS Kesehatan. Hingga akhirnya menggunakan Jasindo pada tahun 2015. Agung berharap, Jasindo segera merealisasikan kerja sama dengan RSUP dr. M. Djamil yang juga menjadi RS rujukan dan RS pendidikan ini.

“Mestinya ketika Jasindo mendapatkan tugas dari Kementerian Keuangan untuk menyediakan asuransi bagi Anggota DPR beserta keluarganya, sejak itu pula harus segera bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit paling baik di provinsi atau kabupaten dan kota,” kilah Agung. ■ (sc/sf)

mendudukan dan memberikan wewenang kepada KPI dalam melakukan pemantauan *online* dan *streaming*. Masyarakat mau mengadu ke mana bila ada tayangan *online* yang menyimpang. Kalau bisa RUU penyiaran juga memasukkan tugas pemantauan KPI ini,” harap Biem. ■ (mb/sc)



Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin

Foto : smparati/ir

Korpri DPR RI Gelar Sunatan Massal

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menggelar sunatan massal yang diikuti 25 peserta. Peserta merupakan keluarga dari PNS golongan I, golongan II, pegawai tidak tetap, tenaga outsourcing dan cleaning service DPR RI. Kegiatan ini merupakan program rutin yang diselenggarakan Korpri DPR RI di bidang sosial setiap satu tahun sekali.



Pt. Sekjen DPR RI Damayanti memberikan hadiah kepada anak - anak yang akan dikhitan di Gedung Nusantara DPR RI



“Acara ini adalah program dari Korpri, khususnya bidang sosial. Ini merupakan kegiatan rutin setiap satu tahun sekali biasanya diadakan mendekati liburan, tapi kali ini program kerja diawal tahun,” kata Plt. Sekjen DPR RI Damayanti usai membuka acara sunatan massal di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1).

Maya, begitu Damayanti kerap disapa, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan positif ini. Seperti diketahui bahwa selain untuk kesehatan, khitan juga merupakan tuntutan bagi kaum laki-laki dalam agama Islam.

Melalui kegiatan ini, Maya yakin dapat meringankan beban dan membuat anak-anak lebih berani karena dilakukan bersama-sama ditambah lagi ada hadiah yang diberikan Bank BNI berupa sarung dan uang tunai sebesar Rp 300 ribu, sehingga dipercaya para peserta akan lebih semangat.

“Saya senang anak-anak sudah mau dan berani. Khitan itu bukan hal yang menakutkan. Apalagi ini dilakukan ramai-ramai,” imbuh Maya.

Maya mengucapkan terimakasih terhadap pihak-pihak yang turut berpartisipasi dalam acara ini, khususnya Korpri DPR RI selaku penyelenggara, Bagian Pelayanan Kesehatan selaku tenaga medis, dan Bank BNI atas bantuan finansial. Ia berharap kerjasama ini akan selalu terjalin dengan baik dan kegiatan ini akan terus menjadi agenda rutin.

Dalam penutup sambutannya, Maya mendoakan agar peserta khitanan ini nantinya menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa. “Saya doakan semoga anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa dan bangsa” tutupnya. ■ (apr/18)



Ketua DPR Bambang Soesatyo mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memantau performa kinerja sepanjang tahun 2017 dan bulan pertama di tahun 2018 di kawasan SCBD, Rabu (31/1). **Foto: Jayadi**



Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon menerima kunjungan para siswa dari SMA Islam Terpadu Insantama Gunung Batu Bogor di Gedung DPR, Rabu (31/1). **Foto: Runi**



Setjen dan Badan Keahlian DPR menyelenggarakan pembekalan orientasi kepada 55 CPNS dalam rangka membentuk mental aparatur yang profesional handal dan akuntabel di Gedung DPR, Kamis (1/2). **Foto: Doeh**